

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan:

Berdasarkan analisis Bab 5 yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa realitas perlindungan tahanan anak di Rutan “X”, berdasarkan tolok ukur “kondisi fisik” rumusan *The Association for the Prevention of Torture/ APT*, hanya sebagian memenuhi poin-poin acuan pokok “kondisi fisik” rumusan APT. Disamping beban kerja pihak Rutan yang harus menampung wilayah Jabodetabek sehingga dibutuhkan anggaran besar untuk pemenuhan hak “kondisi fisik”, kurangnya perlindungan juga disebabkan karena kurangnya komitmen dari pihak penyusun anggaran sehingga terjadi ketimpangan antara pemenuhan kebutuhan fasilitas Rutan sendiri sebagai kantor dengan pemenuhan kebutuhan fasilitas Rutan sendiri sebagai “kondisi fisik”, dimana anggaran dalam Petunjuk Operasional Kegiatan T.A. 2009 cenderung lebih banyak digunakan untuk kebutuhan kantor beserta sarana prasarananya dan untuk pemenuhan kebutuhan pegawai Rutan “X”. Adapun pemenuhan hak “kondisi fisik” sebagai bentuk perlindungan tahanan anak dapat dirinci kesimpulannya sebagai berikut:

- a. Pemenuhan hak makanan setidaknya telah memenuhi hampir semua poin dalam acuan pokok APT dan 3 (tiga) poin efektivitas implementasi kerangka kerja hukum dalam Sistem Perlindungan Tahanan Nasional (APT: 2004). Bukti konkretnya dimulai dengan peningkatan anggaran untuk makan/minum tahun 2007, pengolahan masakan menghasilkan rasa lebih baik, program menu 10 hari menjadi lebih bervariasi, beras berkualitas baik, pemberdayaan koperasi dengan menjual makanan tambahan untuk mengisi interval jam waktu makan (penerapan program “Budaya Tertib Pemasarakatan”).
- b. Pemenuhan hak akomodasi dalam hal ini perawatan bangunan blok hunian para tahanan tidak tercantum dalam Petunjuk Operasional Kegiatan T.A. 2009 padahal sebagian struktur bangunan blok hunian tidak memenuhi standar

kesehatan seperti di Blok B. Kontradiksi ternyata ditemukan adanya anggaran untuk perawatan gedung kantor senilai Rp.199.075.000,-

- c. Dalam pemenuhan hak akomodasi, karena adanya percampuran antara narapidana, residivis, dan tahanan, maka timbullah senioritas dalam bentuk struktur kekuasaan informal. Masih diketemukannya struktur informal di penghuni pria, menyebabkan kelompok yang termaginalkan tidak dapat mengakses hak-haknya seperti sabunya diambil, makanannya dikurangi. Hal ini tidak diketahui oleh petugas. Tapi ironisnya peranan struktur informal oleh paste blok di anggap positif, karena peranannya suka membantu paste blok ketika sedang bertugas. Temuan baru bahwa selain kekuatan uang terdapat kekuatan kesetiakawanan dan keberanian diri untuk melawan struktur informal.
- d. Pemenuhan hak penerangan dan ventilasi sudah cukup baik disetiap blok hanya saja di Blok B kurang baik disebabkan berplafon rendah dan berventilasi kecil.
- e. Pemenuhan hak kesehatan pribadi (sabun mandi, odol, sikat gigi, instalasi mandi) sudah tercantum dalam Petunjuk Operasional Kegiatan TA. 2009 anggaran senilai Rp. 125.000.000,- , namun anggaran tersebut digabung untuk keperluan alat makan-minum dan pemindahan-pemulangan tahanan/napi (biaya umum), sehingga penyediaan sabun mandi, odol, sikat gigi kurang akibat minimnya anggaran. Kualitas air di blok pria buruk dan sering mati. Kondisi ini dibarengi kurang sadarnya arti kebersihan tahanan anak pria.
- f. Pemenuhan fasilitas kebersihan (instalasi jamban), tidak tercantum dalam Petunjuk Operasional Kegiatan T.A. 2009 padahal di blok pria ditemukan jamban yang tidak berfungsi, sehingga buang air besar di saluran air kamar mandi.
- g. Pemenuhan hak pakaian, dengan tidak adanya anggaran khusus untuk pakaian maka otomatis pakaian penghuni di bawa dari rumah masing-masing. Walaupun ada anggaran untuk pakaian baju koko pria, dan pakaian tamping.
- h. Oleh karena itu dapat dilihat pihak Rutan belum optimal dalam pemenuhan hak akomodasi, kesehatan pribadi fasilitas kebersihan, dan pakaian. Maka pemenuhan hak tersebut diciptakan dari mereka sendiri dan dari organisasi-

organisasi kemasyarakatan. Padahal sesungguhnya tanggung jawab pihak Rutan untuk mengakomodir hak-hak tersebut.

6.2 Saran:

Dalam pemenuhan hak-hak tahanan anak maka bila dilihat dari akar permasalahannya yaitu perlunya langkah deinstitutional bagi tahanan anak sehingga tidak perlu menumpuk di Rutan sebagai solusi langkah panjang Solusi langkah pendeknya antara lain:

- a. Perlunya pemerataan anggaran dalam Petunjuk Operasional Kegiatan Tahanan, sehingga tidak terlalu timpang dengan pemenuhan kebutuhan fasilitas Rutan sendiri sebagai kantor dengan pemenuhan kebutuhan fasilitas Rutan sendiri sebagai “kondisi fisik”
- b. Tahanan juga bisa menjadi tamping mengingat banyak yang tahanan yang masa tahanannya mencapai satu tahun, agar tahanan mendapat stimulasi dan menghindari kecemburuan.
- c. Kekuasaan struktur informal di penghuni pria harus dihilangkan, mengingat mereka hanya segelintir penghuni, sedangkan berdasarkan transkrip wawancara tahanan anak mereka pada dasarnya anak-anak yang ingin berubah menjadi baik dan menyayangi keluarga. Maka dari itu Kepala Rutan harus turun lapangan, oleh karena struktur ini mengganggu, menghambat akses beberapa tahanan anak untuk mendapatkan hak-haknya.
- d. Pendapat penulis, personil Rutan perlu di kaji lagi tentang penempatannya. Karena kunci perubahan adalah paste blok perlu di tingkatkan kualitas, profesional karena paling bersentuhan intens dengan mereka dalam blok hunian, perbandingan pegawai yang kerja di belakang meja dengan yang di Blok lebih disamaratakan.
- e. Perlunya monitoring berkala terhadap kinerja paste baik dari pihak internal maupun pihak eksternal. Sehingga tidak perlu mengeluarkan anggaran berlebihan seandainya mengoptimalkan SDM yang sudah ada
- f. Lebih mengoptimalkan kegiatan sesuai paradigma Rutan sehingga anak-anak mempunyai kegiatan lebih banyak diluar sel/kamar, yang tidak membutuhkan anggaran banyak, Oleh karena itu SDM harus lebih kreatif membuat kegiatan-

kegiatan bermanfaat seperti mengoptimalkan perpustakaan, permainan olahraga, dan sebagainya.

- g. Semuanya kembali lagi dari *political will* para pejabat interanl Rutan “X”, dalam rangka menerapkan program Budaya Tertib Pemasarakatan menuju terciptanya Rencana Strategi 2010 -2015 sesuai tercantum dalam *blue print* Panduan Rencana Strategi Pembangunan Direktorat Jenderal Pemasarakatan 2010-2015.

